

“PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAPIN TENGAH”

Linda Agustina¹, Dewi Merdayanty², Fakshianoor³

. Administrasi Publik, 63101, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan
(Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari. 19120407

. Administrasi Publik, 63101, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan
(Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari. 060610315

. Administrasi Publik, 63101, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan
(Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari. 1120106301

Email:lindaagstn8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di KUA Kecamatan Tapin Tengah dan untuk mengetahui apakah proses pemberian layanan telah sesuai dengan standar pelayanan seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi terhadap beberapa narasumber. Pembahasan berpedoman terhadap standar pelayanan yang tercantum pada UU No.25 Tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan standar pelayanan seperti yang dicantumkan, hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan-keluhan masyarakat terhadap beberapa komponen standar pelayanan yang dianggap masih kurang memadai.

Kata kunci : *Pelayanan Publik, Kantor Urusan Agama.*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of public services in KUA Kecamatan Tapin Tengah and to find out whether the service delivery process is in accordance with service standards as stated in Law No. 25 of 2009 concerning Public Services. This study used a descriptive qualitative approach, data was obtained using interview, observation and documentation techniques for several resource persons. The discussion is guided by the service standards listed in Law No. 25 of 2009. The results of this study show that the implementation of public services in the Office of Religious Affairs of Central Tapin District still does not fully meet the provisions of service standards as listed, this is evidenced by public complaints against several components of service standards that are considered inadequate.

Keywords: *Public Service, Office of Religious Affairs.*

melakukan penelitian, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan mengenai jam operasional di Kota Banjarmasin bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. Meskipun sejak diresmikannya peraturan walikota tersebut pada tahun 2022 hingga sekarang, memberikan efek yang cukup baik menurunnya tingkat kemacetan tetapi untuk tingkat kecelakaan masih belum ada perubahan. Selama penelitian, masih sering ditemukannya kendaraan angkutan besar yang melintas bukan pada jam operasional yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2022.
2. Manfaat yang didapat dalam penerapan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Besar Di Kota Banjarmasin yakni, tingkat kemacetan yang dinilai sudah berkurang. Namun dengan berkurangnya titik kemacetan yang ada di Kota Banjarmasin tidak menjamin kendaraan angkutan besar tetap melintas bukan pada jam operasional mereka. Hal ini masih dapat peneliti lihat yang mana masih adanya kendaraan angkutan besar yang melintas pada jalan raya yang bukan pada jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

REFERENSI

Buku

- Angger Sigit Pramukti, S. d. (2018). *PENGAWASAN HUKUM TERHADAP APARATUR NEGARA*. 2016: pustaka yustisa.
- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, M. (2021). *PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK*.
- Chairil Anwar Pohan (2021). *KEBIJAKAN & ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAERAH DI INDONESIA* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .
- Ermanovida (2022). *STRATEGI IMPLEMENTASI KULIAH DARING DI MASA PANDEMI* . 2021: Bening media publishing 2021 dan bekerja sama dengan FKIP Universitas sriwijaya.
- Syahrudin (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: KONSEP, TEORI DAN KASUS*. 2018: Penerbit Nusa media .
- Sobirin Maliam, (2021). *KEBIJAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM* . Yogyakarta : 2021.

Jurnal

- Arham Nugroho, A. (2023). Pengawasan Truck Bermotase Berat Pada Jalur Angkutan Barang Di Kota

Hami Matus Sanah, M.Sayuti Enggok, Akhmad Nikhrawi H | 14

As Siyasah, Vol. ..., No. ... November 2022

ISSN :

- Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Mediansyah, A. R. (2017). Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 14-22.
- Rahmatillah, M. Implementasi Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2012 Tentang Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Atau Truk Bertonase Besar Di Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Safitri, R. D. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Samarinda No. 23 Tahun 2010 Tentang Penerapan Lintasan Angkutan Barang Di Wilayah Kota
- Saputri, L. O., & As'ari, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Lalu Lintas Truck Bermotase Besar Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 34-41.

- Virgayanti, N. K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 147-159.

Lainnya

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Besar Di Kota Banjarmasin
- <https://dutatv.com/tragis-mahasiswa-ulm-banjarmasin-tewas-dilindas-truk/>
- <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/29/breaking-news-truk-terguling-depan-kodim-1007-jalan-s-parman-banjarmasin-macet-panjang>
- <https://idalamat.com/alamat/40267/dinas-perhubungan-kota-banjarmasin>
- <https://dishub.kalselprov.go.id/>

